


Peran Kementerian Agama Dalam Moderasi Beragama

M. Hendri Sugara Sinaga¹, Arif Maulana², Insan Akbar³, Muhammad Arif Lubis⁴, Haikal⁵, Raja Mahendra Siregar⁵

^{1,2,3,4,6}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

⁵Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Corresponding Author  ajarmirwan9991010@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran kementerian agama dalam moderasi beragama. Metode penelitian menggunakan library research dengan berlandaskan analisis dari berbagai macam sumber referensi, baik buku atau jurnal online. Hasil penelitian ini adalah kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Moderasi Agama, Peran Kementerian Agama, Keagamaan

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

PENDAHULUAN

Kementerian Agama sebagai sub sistem pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebgai tugas pemerintah di bidang agama. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kementerian Agama Kota Medan lebih banyak menitikberatkan pada pelayanan terhadap masyarakat di bidang agama. Seiring dengan perkembangan tuntutan pelayanan pada masyarakat yang semakin kompleks, perlu terus ditingkatkan kualitas kinerja pelayanan masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional (Deni & Salamuddin, 2019; Qomar, 2019);. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah (Wahab, 2016;. Ridwan, 2018). Tingginya perolehan IKS ini dipengaruhi oleh peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan, yang telah diprogramkan pada Renstra sebelumnya, didukung dengan berbagai

Kementerian Agama sebagai sub sistem pemerintahan Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebgai tugas pemerintah di bidang agama. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kementerian Agama Kota Medan lebih banyak menitikberatkan pada pelayanan terhadap masyarakat di bidang agama. Seiring dengan perkembangan tuntutan pelayanan pada masyarakat yang semakin kompleks, perlu terus ditingkatkan kualitas kinerja pelayanan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama

merupakan agenda penting dan strategis dalam pembangunan nasional (Sari, 2019; Siregar, 2017). Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial (IKS) (Prasojo, 2017). Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Tingginya perolehan IKS ini dipengaruhi oleh peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama.

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan telah berhasil menumbuhkan kualitas spiritual keagamaan di kalangan umat beragama dalam pemahaman nilai-nilai ajaran agama. Dukungan Kementerian Agama berupa bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan hari besar keagamaan. Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat. mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (wasathiyah), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan. Peran Kementerian Agama adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah terjadi peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

METODE

Metode penelitian ini adalah library research. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang dihubungkan dengan fenomena masyarakat muslim. Materi kajian diambil dari referensi yang berasal dari buku-buku jurnal, dan dari sumber cetak maupun elektronik yang ditelusuri melalui internet dengan cara menghimpun atau mengumpulkan lalu memilah, kemudian menelaah dan mengkritisi persamaan dan perbedaannya sampai menemukan sebuah simpulan. Penelitian ini dilakukan hanya dengan melihat fenomena yang diteliti tanpa melihat intervensi. Artinya saat penulis melakukan pengkajian hanya cukup berdasarkan pada apa saja yang ditemukan di studi pustaka yang mungkin diketahui lewat internet, sosial media dan lain-lain. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Bermasyarakat Dalam Lingkup Kementerian Agama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagaman masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kementerian Agama melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan, kerja sama nasional dan internasional. Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB), yang mencakup tiga dimensi, yaitu:

- (1) toleransi;
- (2) kesetaraan, dan

(3) kerja sama.

Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variabel- variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal. Kementerian Agama telah berupaya mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh aktor-aktor kerukunan yang merupakan semua komponen masyarakat yang di antaranya terdiri atas pimpinan majelis-majelis agama, pimpinan ormas-ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, penyuluh agama, pengawas, dosen, guru agama, dan insan jurnalis. Disebut 'aktor', karena diharapkan tokoh-tokoh tersebut dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat atas apa-apa yang telah disampaikan dalam kegiatan dialog, workshop, dan seminar terkait kerukunan.

Kompetensi dalam Kerukunan Umat Beragama

Kompetensi aktor dalam kerukunan umat beragama ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti:

- 1)Pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama,
- 2)Peningkatan kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik,
- 3)Pelatihan promosi kerukunan umat beragama, dan penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai.

Pelibatan tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait kerukunan umat beragama. Penguatan kompetensi aktor-aktor kerukunan merupakan modal dalam membingkai kerukunan antarumat beragama guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian. Tujuan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
- 2.Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
- 3.Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
- 4.Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah
- 5.Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain- lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan. Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama (Hanun, 2018). Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien.

KESIMPULAN

Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah. Penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, penguatan penyebaran pesan-pesan keagamaan dan pemberdayaan lembaga keagamaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menghaturkan terimakasih kepada Ani Juni Marno Koto, Nurmala Indah Siregar, Sri Etika Mutia, dan Meilani Annisa telah berkontribusi dalam menulis manuscript jurnal

REFERENCE

- Deni, I. F., & Salamuddin, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Alumni PTKI: Analisis Alumni Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UINSU di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 3(1), 19-24.
- Hanun, M. P. (2018). Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Kementerian Agama. *Edukasi*, 16(2), 294655.
- Prasojo, A. B. *Difusi Inovasi Gerakan “Mensholatkan Orang Hidup” Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Qomar, M. (2015). Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam. *El-harakah (terakreditasi)*, 17(2), 198-21
- Ridwan, M. (2018). Upaya Baznas Jepara dalam Menanamkan Kesalehan Sosial Pelajar melalui Program Pekan Peduli Sosial (PPS). *Jurnal Bimas Islam*, 11(4), 723-748.
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177-187.

- Siregar, R. (2017). Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. *Pros. Semin. Nas. Tah. Fak. Ilmu Sos. Univ. Negeri Meda, 1*, 378-381.
- Wahab, A. J. (2016). *Indeks kesalehan sosial masyarakat Indonesia*. Puslitbang Kemenag.